

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Hukum Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pada dasarnya pembentukan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan jalan didasari dengan terwujudnya keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan. Hal ini bertujuan demi terpenuhinya perkembangan strategis nasional dan internasional baik dari bidang ilmu pengetahuan hingga perekonomian negara serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Diawali dengan adanya pemberlakuan *Undang-Undang No. 3 Tahun 1951 Perubahan Dan Tambahan Undang Undang Lalu Lintas Jalan* yang kemudian dengan selang waktu 15 tahun diubah lagi menjadi *UU No. 3 Tahun 1965 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* dan dicabutnya undang-undang sebelumnya. Setelah Indonesia mengalami perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi, undang-undang mengalami perubahan menjadi *Undang-Undang No. 22 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* yang mana waktu itu ditangguhkan oleh pemerintah karena berbagai pertimbangan oleh pemerintah dan diubah dan disahkan menjadi *Undang-Undang No. 41 Tahun 1993 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Untuk selanjutnya peraturan ini mengalami perubahan karena relevansinya dari tahun ke tahun dan semangat reformasi menjadi dasar perubahan peraturan Undang-Undang LLAJ menjadi *Undang-*

Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika dilihat dari perkembangan Undang-Undang mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang No. Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki legitimasi atas asas *lex posterior derogat lex priori* dimana secara substansinya Undang-Undang atau hukum (*Lex Posterior*) terbaru mengesampingkan Undang-Undang atau hukum yang lama (*Lex Prior*). Dalam kurun waktu 10 tahun pasal ini masih tetap digunakan sebagai dasar hukum pengaturan lalu lintas jalan raya dan angkutan jalan seperti trayek dan sebagainya.

1. Tujuan Diselenggarakan Undang-Undang Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Secara konsideran menimbang dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, tujuan diselenggarakannya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 disebutkan antara lain :

- a. Bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan,

ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah;

c. Bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara;

d. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Pada Paragraf Bab ke-2 (kedua) Asas dan Tujuan dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan

- kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
 - c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

2. Tindak Pidana Yang Diatur Sebagai Larangan Penggunaan Handphone Di Jalan Raya

Hal yang paling mendasari penulisan ini adalah pada pasal 106 ayat 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi :

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.”

Jika dilihat dari kata wajar dan penuh konsentrasi ini dijadikan dasar sebagai larangan adanya GPS yang mana dalam perkata yaitu wajar dan penuh dengan konsentrasi. Wajar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai :

1. Biasa sebagaimana adanya tanpa tambahan apa pun;
2. Menurut keadaan yang ada; sebagaimana mestinya⁴ dan konsentrasi yaitu :

- I. Pemusatan perhatian atau pikiran pada suatu hal;

⁴ KBBI, *Wajar*, dalam <https://kbbi.web.id>, diakses tanggal 31 Agustus 2019

- II. Pemusatan tenaga, kekuatan, pasukan, dan sebagainya di suatu tempat;
- III. Pemusatan beberapa penerbitan dalam satu kekuasaan;
- IV. ⁵Persentase kandungan bahan di dalam satu larutan.

Sedangkan di dalam penjelasan pasal 106 ayat 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 sendiri dijelaskan bahwa Yang dimaksud dengan "penuh konsentrasi" adalah setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di Kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan Kendaraan.

Sebagaimana kita ketahui dalam suatu kegiatan berupa berkendara, dalam melakukan suatu kewajaran berkendara adalah biasa sebagaimana mestinya tanpa adanya tambahan apapun dan penuh konsentrasi.

B. Tinjauan Umum Tentang Ojek Online

Ojek atau bisa disebut ojeg memiliki artian yaitu media transportasi atau sarana untuk memindahkan orang ataupun barang dari suatu tempat menuju tempat lain yang tujuannya membantu orang atau suatu kelompok orang ke tempat yang dituju atau yang dikehendaki, mengirimkan barang dari tempat asal ke tempat yang berbeda sebagai

⁵ KBBI, Konsentrasi dalam <https://kbbi.web.id>, diakses tanggal 31 Agustus 2019

tujuannya dalam penjelasan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Proses tersebut dilakukan menggunakan kendaraan ataupun tanpa kendaraan yaitu diangkut oleh orang yang mana transportasi umum ini tidak termasuk angkutan resmi di Indonesia dan berupa sepeda motor atau sepeda dengan cara memboncengkan penumpang (orang atau barang) dengan harga yang ditentukan lewat tawar menawar antara sopir dengan penumpang dimana jarak tempuh yang akan dilalui oleh ojek menjadi dasar harga yang akan ditawarkan⁶ dan dalam KBBI disebutkan bahwa ojek adalah sepeda atau sepeda motor yang ditambangkan dengan cara memboncengkan penumpang atau penyewanya⁷. Di dalam Undang-Undang juga memberikan pengertian pada ojek pada Pasal 1 ayat (20) UULLAJ menyatakan bahwa “Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan beroda tiga tanpa rumah-rumah”. Ojek merupakan sarana transportasi darat yang menggunakan kendaraan roda dua (sepeda motor) untuk mengangkut penumpang dari satu tujuan ke tujuan lainnya kemudian menarik bayaran⁸. Sedangkan online adalah istilah saat kita sedang terhubung dengan internet atau dunia maya, baik itu terhubung dengan akun media sosial kita, email dan berbagai jenis akun lainnya yang kita pakai atau gunakan lewat internet⁹.

⁶ Wikipedia, *Ojek* dalam <https://id.wikipedia.org>, diakses tanggal 31 Agustus 2019

⁷ KBBI, *Ojek* dalam <https://kbbi.web.id>, diakses tanggal 31 Agustus 2019

⁸ Sudut Hukum, *Ojek Online* dalam <https://suduthukum.com>, diakses tanggal 31 Agustus 2019

⁹ Pengertianku, *Pengertian Online dan Offline* dalam <http://www.pengertianku.net>, diakses tanggal 31 Agustus 2019

Selanjutnya dari penjelasan diatas bahwa ojek online sendiri dapat diartikan sebagai ojek yang menggunakan teknologi berupa pemanfaatan aplikasi pada handphone untuk memudahkan komunikasi sebagai bentuk pemanggilan driver ojek online dimana pemesan ojek online dapat melakukan banyak hal pemanfaatan yaitu pengangkutan barang atau orang dengan cara penjemputan secara pertemuan langsung dengan pemesan, memesan barang, hingga memesan makanan. Pemesanan dilakukan oleh pemesan dengan cara memberitahukan apa yang dibutuhkan dan driver ojek online mendapatkan pemesanan lewat aplikasi pada handphone dan mencari letak dimana tempat awal barang atau orang dilakukan penjemputan untuk diangkut ke tempat yang menjadi tujuan akhir dari pesanan.

C. Penegakan Hukum

1. Definisi Penegakan Hukum

Penegakan Hukum dalam pengertiannya yaitu suatu bentuk usaha atau upaya dalam tegak atau berfungsinya norma-norma hukum baik dari konsep hukum, ide-ide hukum demi mewujudkan suatu keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum menjadi nyata di masyarakat dan negara.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁰

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan menegajewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹¹

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum

¹⁰ Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 32

¹¹ *Ibid* hlm 33

merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.¹²

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:¹³

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum dapat diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk dapat menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum itu berjalan sebagaimana yang telah diatur seharusnya oleh aturannya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukum:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Adhitya Bakti, 1996, hlm 12

¹³ *Opcit* hlm 33

nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

D. Efektivitas Hukum

1. Definisi Efektivitas Hukum

Menurut rumusan Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Maksud dari keinginan disini adalah perumusan suatu pikiran-pikiran badan sebagai pembentuk Undang-Undang di dalam peraturan-peraturan hukum. Hal ini turut menjadi penentu bagaimana nantinya penegakan hukum dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya atau dapat dikatakan berhasil atau tidaknya dapat dilihat dari bagaimana para penegak hukum dapat melaksanakan hukum dengan sebagaimana mestinya sejak hukum dibuat.¹⁴

Efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum.¹⁵

Orang menaati hukum karena takut akan akibatnya berupa suatu penderitaan apabila norma tersebut dilanggar. Hukum yang demikian memerlukan suatu system pengawasan dari pejabat hukum bukan

¹⁴ Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 25

¹⁵ W. Yudho dan H. Tjandrasari, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta : Majalah Hukum dan pembangunan, UI Press, 1987), hlm. 59

pengawasan dari masyarakat. Begitu system pengawasan hilang, maka hukum tersebut menjadi disfungsional.¹⁶

2. Faktor Pendukung Efektivitas Hukum

Ada 5 faktor yang menjadi ukuran efektif atau tidaknya suatu hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu :¹⁷

i. Faktor hukumnya sendiri (Undang Undang)

Secara umum dapatlah dikatakan bahwa peraturan hukum yang baik itu adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Suatu peraturan hukum berlaku secara yuridis, menurut Hans kelsen apabila peraturan hukum tersebut penentuannya berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya.

Suatu peraturan hukum berlaku secara sosiologis bilamana peraturan hukum tersebut diakui dan diterima oleh masyarakat kepada siapa peraturan hukum tersebut ditujukan/diberlakukan (menurut “*Anerkennungstheorie*”, *The Recognition Theory*).

Kemudian, suatu peraturan hukum berlaku secara filosofis apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi dalam Negara Indonesia, cita cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi

¹⁶ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Banjarmasin, 2004. Hlm. 192-193

¹⁷ Riduan Syahrani, *Op.Cit*, Hlm. 184

adalah masyarakat yang makmur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

ii. Faktor penegak hukum

Yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Penegak hukum sebagai salah satu faktor yang menentukan proses penegakan hukum tidak hanya pihak-pihak yang menerapkan hukum, tetapi juga pihak-pihak yang membuat hukum. Pihak-pihak yang terkait secara langsung dalam proses penegakan hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, kehakiman, kepengacaraan, dan pemasyarakatan, mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi keberhasilan usaha penegakan hukum dalam masyarakat.

Penegak hukum merupakan golongan pantauan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan perananan yang dapat diterima oleh masyarakat. Selain itu, penegak hukum juga harus bijaksana untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat, memperkenalkan peraturan-peraturan hukum baru, dan menunjukan keteladanan yang baik.

iii. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

iv. Faktor masyarakat

Bagian yang terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Secara umum kesadaran hukum meliputi :

- a. Pengetahuan tentang hukum.
- b. Penghayatan fungsi hukum.
- c. Ketaatan terhadap hukum.

v. Faktor kebudayaan

Yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai nilai mana merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Semakin banyak persesuaian antara perundang undangan dengan kebudayaan masyarakat maka akan semakin mudahlah menegakan hukum, sebaliknya jika peraturan perundang undangan yang tidak sesuai dengan kebudayaan masyarakat maka akan sulit untuk menegakan hukum.

